

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang disampaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana militer mampu melakukan kegiatan di luar wilayahnya sebagaimana yang menjadi kegiatan sipil dalam konteks ini yaitu TMMD (Tenatara Manunggal Membangun Desa) serta, peneliti akan mengurai bagaimana logika dan proses terbentuknya kebijakan TMMD ini di Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatra Selatan. Hasil dari Badan Pusat Statistik OKI pada tahun 2017 menunjukkan 9 dari 20 desa tersulit di Sum-Sel berada di OKI, salah satu desa tersebut adalah Desa Sungai Ceper.

Wilayah ini termasuk kedalam wilayah yang terisolir sehingga tingkat kriminalitas cukup tinggi. Hal itu bisa dibuktikan dengan hasil Badan Pusat Statistik OKI pada tahun 2017 lalu, jumlah tindak pidana sekitar 53 kasus, hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kriminal di wilayah ini berada di tingkat ke-4 dari 18 kecamatan yang ada di OKI.¹ Wilayah ini awalnya sangat susah di akses infrasuktur yang belum memadai, sehingga tingkat kriminal di desa tersebut sangat tinggi. Yang menjadi masalahnya yaitu peredaran narkoba dan senjata api di wilayah ini. Selain faktor infrasuktur yang sulit memadai alasan

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir, <https://okikab.bps.go.id/publication/2017/09/22/dda8e5aa5ecd99ddd94254d1/kecamatan-sungai-menang-dalam-angka-2017.html>, dikases pada 14 September, 2017

lain yaitu jauhnya jarak tempuh yang di lalui untuk sampai ke Sungai Ceper. Oleh sebab itu, desa ini termasuk ke dalam desa yang termarginalkan.

Adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap Sungai Ceper dikarenakan wilayah ini “rawan”. Selain itu, dengan adanya kebijakan TMMD ini bisa menghilangkan secara perlahan stigma masyarakat tentang keberadaan “kampung senjata api rakitan (senpira)” di Desa Sungai Ceper melalui pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bersama TNI dan Polri. Dalam kegiatan TMMD ke-101 tahun 2018 dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten OKI H. Husin, S.Pd., M.M., menuturkan bahwa program ini sangat tepat dalam membantu pemerintah di wilayah pelosok dan setidaknya mampu menghilangkan sedikit demi sedikit dengan stigma warga bahwa Desa Sungai Ceper tempat masyarakat memproduksi Senpira.²

Pembinaan teritorial atau yang biasa di kenal dengan Binter merupakan salah satu kegiatan Bhakti TNI yang bertujuan untuk membangun hubungan antara TNI-sipil sehingga terbentuknya kemandirian. Binter dalam kebijakan TMMD ini merupakan salah satu poin yang terdapat dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Salah satu poin yang terdapat dalam UU tersebut yaitu membantu pemerintah daerah, dengan adanya program TMMD ini diharapkan mampu membantu pemerintah lokal di wilayah pelosok yang kemungkinannya sulit untuk di jangkau oleh pemerintah daerah tersebut.

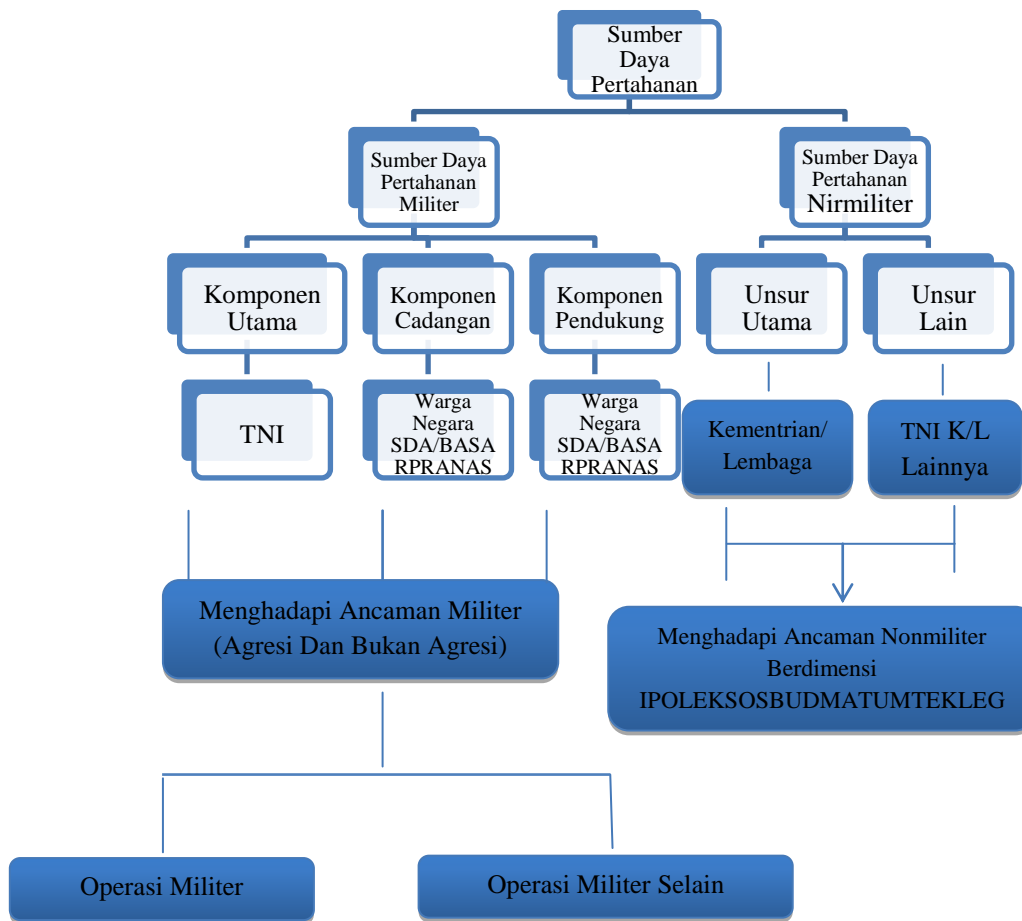
² Eko Saputra, *Sungai Ceper OKI Bukan Lagi Kampung Senpira*, <http://www.globalplanet.news/berita/6044/sungai-ceper-ok-i-bukan-lagi-kampung-senpira,OKI:GLOBALPLANET.news>, 04 April, 2018

Akan tetapi, menurut Petrus Barus bahwa muncul perdebatan mengenai fungsi TNI yang sesungguhnya di dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI BAB II (Pasal 2) huruf D. Tugas baru TNI dalam melakukan operasi militer dan operasi militer selain perang bisa di katakan jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang yang lahir dari rahim revolusi yang karena faktor sejarah, dalam dirinya sudah tertanam tanggung jawab moral untuk ikut memajukan bangsa dan negara di seluruh aspeknya mulai dari pembangunan ekonomi, politik, dan budaya.³

Istilah supremasi sipil sendiri dinilai penting dipertimbangkan untuk diubah atau diganti dengan sebutan yang lebih pas dan sesuai dengan jati diri TNI. Salah satu alternatif sebutan adalah supremasi rakyat. Istilah ini setidaknya meredam potensi munculnya dikhotomi sipil militer. Istilah ini juga sesuai dengan jati diri TNI. Selain itu juga, masyarakat menilai bahwa kiprah lembaga militer berperan sebagai menjaga dan mempertahankan NKRI keselamatan bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dalam atau luar negara yang kiranya akan membahayakan.⁴

³ Petrus Barus, “TNI Supremasi Sipil atau Supremasi Rakyat”, <https://nusantara.news/tni-supremasi-sipil-atau-supremasi-rakyat/>, 9 Desember, 2017

⁴ *Ibid.*



Bagan 1.1 Skema Strategi Pertahanan.⁵

Seiring berjalannya waktu, Indonesia dirasa sudah cukup aman dan damai dari serangan luar negara, maka dari itu tidak terlalu diupayakan lagi dalam menjaga keamanan negara bagi masyarakat, karna sesungguhnya keamanan itu muncul dari dalam diri manusia itu sendiri. Selain berperan dalam kekuatan pertahanan negara, militer (TNI) juga menjadi salah satu kekuatan pemerintah dalam menjalankan proses pembangunan nasional berupa Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Hal itu berguna untuk memberikan kekuatan kultural Indonesia dalam kancah internasional, selain itu juga hal

⁵ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Cetakan Kedua, 2014), hlm.36

tersebut dilakukan guna mendukung kepentingan penyelenggaraan seluruh fungsi pertahanan dan mendukung pelaksanaan operasi TNI AD.⁶

Salah satu dampak dari munculnya kebijakan TMMD ini yaitu perubahan paradigma masyarakat di mana dulu masyarakat menganggap bahwa TNI salah satu musuh rakyat, dengan hadirnya kebijakan TMMD ini merubah paradigma negatif itu menjadi lebih baik sehingga TNI tidak dianggap sebagai musuh dan tidak di pandang sebelah mata lagi oleh masyarakat. Upaya TNI untuk merubah paradigma tersebut cukup besar dengan membantu urusan pemerintah dari bahaya kelaparan, buta huruf dan penyakit menular dengan cara yaitu tentara ikut terlibat dalam proses memajukan dan mengembangkan desa-desa yang mempunyai potensi lebih baik.

Menariknya dari hal ini yaitu berubahnya paradigma di tubuh militer dan adanya perubahan dari TNI dalam memberikan rasa aman yang dimaknai dengan seragam dan kekuatan bersenjata berubah menjadi negara yang dinamis ke arah yang lebih baik, serta ketidakbakuan lagi dalam hal keamanan. Ketidakbakuannya lagi kemanan itu mulai dari ekonomi, akses dan infrastruktur, dll. Program dari kebijakan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) rata-rata sudah di laksanakan hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu program dari kebijakan ini yang sudah terealisasi yaitu di kabupaten OKI, dimana para tentara ini menghubungkan desa sungai ceper laut ke desa sungai ceper darat. Selanjutnya, program yang lain juga akan di

⁶ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia), hlm. 120

galangan seperti, pembangunan masjid dan jalan yang termasuk dalam jalanan buruk.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana hubungan TNI dan sipil dalam kebijakan TMMD di Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatra Selatan?
2. Bagaimana implementasi pembinaan teritorial dilihat dari pendekatan *human security*?

C. Tujuan Penelitian

Salah satu tujuan penulis melakukan penelitian di Desa Sungai Ceper Kabupaten OKI yaitu: Pertama, untuk melihat hubungan antara TNI dan sipil dalam kebijakan TMMD yang diadakan di Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatra Selatan. Kedua, menjelaskan pembinaan teritorial melalui implementasi *human security*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mengangkat tema tentang Peran TNI dalam pembinaan teritorial di desa Sungai Ceper Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan ide dan pemikiran bagi penelitian tentang hubungan antara TNI-sipil dan konsep *human security* di tingkat lokal, di mana kerangka teoritik ini relatif sedikit dan

belum dikembangkan di Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan mampu membuka mata dan wawasan masyarakat umum bahwa konsep *human security* tingkat lokal tidak hanya di domain dari pihak militer dan kepolisian namun menjadi urusan semua komponen. Kemudian dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah pustaka teoritik dan konsep mengenai hubungan TNI-sipil dan *human security*.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi UIN Raden Fatah Palembang terutama Prodi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana dalam meningkatkan dan menambah wawasan mengenai hubungan sipil-militer dan kajian *human security*.
- b. Manfaat bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang di dapat selama perkuliahan kedalam karya nyata.
- c. Bagi masyarakat umum di harapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan informasi yang luas mengenai peran TNI dalam pembinaan territorial.
- d. Syarat untuk meraih gelar sarjana.

E. Tinjauan Pustaka

Wujud nyata dari implementasi peran TNI ditunjukkan dengan reformasi internal yang terus menerus sesuai dengan dinamika perkembangan reformasi nasional. Melalui cara pandang bahwa apapun yang dilakukan TNI itu selalu dalam rangka untuk pemberdayaan institusi fungsional, peran dan tugas TNI

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu di lakukan atas dasar kebijakan dan keputusan politik. Dalam konteks ini juga bisa kita lihat bahwasanya militer itu secara tampilannya (operasional) serta di manapun ia berada memang diciptakan untuk mempertahankan keamanan negara dan masyarakat dari ancaman musuh baik itu di dalam atau di luar negara.⁷

Pada pasal 27 UUD 1945 menyebutkan bahwa konsep untuk mempertahankan dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi dan kekuatan yang bersifat semesta. Berdasarkan kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri dalam upaya bela negara, di mana TNI sendiri mempunyai prinsip untuk mempertahankan hidup bangsa dan negaranya serta keutuhan NKRI yang harus dijaga dan keselamatan bangsa dengan segenap tumpah darah Indonesia.

TNI dalam menjalankan tugas OMSP dengan program TMMD sebenarnya sudah banyak di lakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, itu bisa dibuktikan dengan adanya perubahan kemajuan dalam hal pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat yang di alami oleh desa-desa yang kurang mendapatkan perhatian lebih. Kesimpulan dari penelitian Ari yaitu membuktikan bahwa peran dan fungsi TNI bisa membantu pemerintah pusat agar terlaksananya program pemerintah daerah dan menjadikannya mandat

⁷ Riswandha Imawan, "Kepemimpinan Nasional dan Peran Militer dalam Proses Demokratisasi", *JISP* Vol. 4, No. 1 Juli, 2000, lihat juga Yahya A Muhaimin, "ABRI dan Demokratisasi di Inodnesia", *JSP* Vol. I, No. 3, Maret, 1998, hlm. 61

dalam instrumen kekerasan demi mempertahankan negara dan rakyat serta menciptakan stabilitas nasional dan pemenuhan kepentingan publik.⁸

Selanjutnya pada kesimpulan penelitian Parlan, dkk., menunjukkan bahwa peran TNI selain dalam membantu program pemerintah lokal, TNI juga bisa mengurangi pengeluaran karna kegiatan ini dilakukan bersama rakyat. Sehingga TNI dan rakyat dapat menjalin hubungan yang erat serta menghilangkan kesan takut rakyat terhadap prajurit TNI, selain itu juga TNI mempererat hubungan kerjanya dengan pemerintah lokal.⁹ Kemudian, pada penelitian Lukman menyimpulkan bahwa TNI dalam membantu penanggulangan bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memainkan perannya cukup dominan di mana dalam hal ini TNI menjadi tulang punggung di berbagai kegiatannya yaitu mulai dari evakuasi korban, distribusi bantuan sampai dengan menyediakan keamanan wilayah bencana.¹⁰ Namun, peran TNI dalam hal proses rekonstruksi bencana hanya bersifat pendukung. Bisa dilihat melalui hasil penelitian yang dipaparkan di atas bahwa peran dan fungsi TNI dalam tugas OMSP berpengaruh besar dalam hal pembangunan daerah, membantu tugas pemerintah serta membantu dalam hal penanggulangan bencana.

⁸ Ari Ganjar Herdiansyah dkk., “Peran dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD dalam Perbantuan Pemerintah Daerah: Studi di Kabupaten Lebak” , *Cosmogov* Vol. 3, No. 1, April, 2017, hlm. 81

⁹ Parlan Pangumpia dkk., “Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Pembangunan Melalui Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) (Suatu Studi di Kecamatan Bunaken Kota Manado)”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume. 1, No. 1, 2018, hlm. 11-12

¹⁰ Lukman M. Fauzi, “Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, Volume. IV, No. II, Desember 2014, hlm. 134

F. Kerangka Teori

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan teori Hubungan Sipil-Militer. Menurut Samuel P. Huntington teori ini mengandung istilah “kontrol sipil obyektif” (*objective civilian control*). Artinya profesionalisme yang tinggi dan pengakuan dari pejabat militer akan batas-batas profesionalisme yang menjadi bidang mereka, pengakuan dan persetujuan dari pihak pemimpin politik tersebut atas kewenangan profesional dan otonomi bagi militer, akibatnya minimalisasi intervensi militer dalam politik dan minimalisasi intervensi politik dalam militer.¹¹

Hubungan sipil militer menurut Michael C. Desch, muncul karna persoalan internal maupun eksternal suatu negara. Negara tersebut yang menghadapi tantangan militer tradisional yaitu ancaman dari luar dan akan lebih mungkin memiliki hubungan sipil-militer yang stabil. Ancaman lingkungan seperti itu memaksa kaum sipil untuk lebih menyatu karena akan membuat mereka mampu menangani masalah bersama-sama dan bersatu dengan militer.

Sebaliknya, Negara yang menghadapi ancaman eksternal yang tinggi akan mempunyai kontrol sipil yang paling lemah. Pemimpin sipil kurang cenderung untuk memperhatikan persoalan keamanan nasional. Dalam situasi semacam ini institusi sipil juga mungkin lemah dan terpecah belah. Faksi-faksi

¹¹ Larry Diamond dan Marc F. Plattner (Ed), *Hubungan-Sipil Militer Dan Konsolidasi Demokrasi*, Terj. Tri Wibowo Budi Santoso, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 4

sipil mungkin akan tergoda untuk menekankan mekanisme kontrol subyektif guna mendapatkan dukungan militer dalam konflik internal.¹²

Dalam penelitian ini konsep kedua yang penulis gunakan yaitu *Human Security*. Menurut Kanti Bajpai *Human Security* adalah konsep yang mengenai perlindungan dan penciptaan kesejahteraan bagi setiap individu warga negara, sehingga tiap-tiap manusia bisa memperoleh keamanan dan kebebasan untuk kesejahterannya masing-masing. Gagasan mengenai *human security* (keamanan manusia) diperjelas dengan adanya laporan dari UNDP perihal *Human Development Report of the United Nations Development Program* pada tahun 1994. Laporan tersebut menyebutkan bahwa, "*the concept of security must change-from an exclusive stress on national security to a much greater stress on people security, from security through armaments to security through human development, from territorial to food, employment and environmental security*".¹³

Adanya isu mengenai *human security* sangat penting dalam kajian keamanan kontemporer. Hal itu dikarenakan masalah kemanusiaan banyak muncul, masalah tersebut mulai dari pengungsian akibat konflik dan kekerasan fisik, penjualan anak-anak dan wanita, masalah pangan, terorisme, perdagangan senjata ilegal, pelanggaran HAM, dan sebagainya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan perubahan konsep dan fokus keamanan dari keamanan yang menitikberatkan kepada keamanan negara menjadi

¹² Michael C. Desch, *Politisi Vs Jendral Kontrol Sipil Atas Militer di Tengah Arus yang Bergeser*, Terj. Tri Wibowo Budi Santoso, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 24

¹³ Elpeni Fitrah, "Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia", *Jurnal INSIGNIA*, Vol. 2, No. 1, April, 2015, hlm. 22

keamanan masyarakat, dari keamanan melalui kekuatan militer menuju keamanan melalui pembangunan masyarakat, dari keamanan wilayah kepada keamanan manusia terkait jaminan keamanan, pangan, pekerjaan dan lingkungan.¹⁴

Menurut Lincoln Chen yang di kutip oleh Fitrah *human security* adalah pelabuan terakhir tempat segala perhatian mengenai keamanan bermuara. Oleh sebab itu, Chen menyebut bahwa bentuk-bentuk keamanan seperti keamanan militer bukanlah tujuan utama melainkan hanya sarana untuk mencapai tujuan yang hakiki yakni keamanan manusia. Keamanan manusia seharusnya mendapatkan perhatian dengan komponennya, yaitu: Pertama, *economic security* (bebas dari kemiskinan dan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup. Kedua, *food security* (kemudahan akses terhadap kebutuhan pangan).

Ketiga, *health security* (kemudahan mendapatkan layanan kesehatan dan proteksi dari penyakit). Keempat, *environmental security* (proteksi dari polusi udara dan pencemaran lingkungan, serta akses terhadap air dan udara bersih). Kelima, *personal security* (keselamatan dari ancaman fisik yang diakibatkan oleh perang, kekerasan domestik, kriminalitas, penggunaan obat-obatan terlarang, dan bahkan kecelakaan lalu lintas). Keenam, *community security* (kelestarian identitas kultural dan tradisi budaya). Ketujuh, *political security*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 30-31

(perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari tekanan politik).¹⁵

Menurut penulis teori *human security*, dalam menjaga keamanan teritorial di wilayah perbatasan menggunakan kekuatan militer. Akan tetapi,

kemanan tersebut bukan hanya pada apa yang diamankan namun siapa yang menjadi sasaran kemanan tersebut. Mengutip dari Yohanes Sanak bahwa konsep keamanan mengalami perluasan, artinya dari keamanan negara yang bersifat tradisional (militer) menjadi keamanan individu (non militer). Keamanan sendiri bukan hanya sebagai keamanan wilayah teritorial namun meliputi juga dalam hal keamanan manusia (*human security*).¹⁶

Salah satu contoh poin yang digunakan dalam kasus ini yaitu *personal security* (keamanan pribadi). Tiap-tiap individu berhak mendapatkan perlindungan masing-masing baik itu dari kriminalitas atau obat-obatan yang terlarang. Pemaknaan keamanan sendiri bisa di pahami sebagai *freedom from fear* yang memberi makna lebih kepada keamanan nasional. Sedangkan, makna *freedom from want* lebih kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk memenuhi keperluan pokok hidup manusia.¹⁷

¹⁵ Elpeni Fitrah, “Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia”, hlm. 31

¹⁶ Yohanes Sanak, *Human Security dan Politik Perbatasan*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Research Centre For Politics And Government, 2012), hlm. 23

¹⁷ Syarifah Ema Rahmaniah, *Model Pembangunan Perbatasan Berbasis Human Development Dan Human Security*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 63-64. Lihat juga Elpeni Fitrah, “Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia”, hlm. 28

G. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini penulis membahas tentang Peran TNI dalam Pembinaan Teritorial (Studi Kasus di Desa Sungai Ceper Kabupaten OKI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pada metode penelitian kualitatif ini mengadopsi pandangan *ontologis* yaitu pengakuan bahwa realitas tidak objektif. Seperti yang dikemukakan oleh Devine bahwa periset perlu dalam setting sosial dari fokus riset.

Hal itu bisa untuk memulai memahami bahwa konteks adalah aspek utama di balik riset kualitatif. Dalam hal ini untuk menjawab permasalahan dalam penelitian bukan hanya mengetahui apa yang terjadi, tetapi memahami juga mengapa dan bagaimana hal ini bisa terjadi.¹⁸

1. Sumber dan Jenis Data

Sumber data utama (primer) adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan orang yang di amati atau diwawancarai. Dalam proses penelitian, sumber data utama dihimpun melalui catatan tertulis atau melalui perekam video/audio tape, pengambilan foto atau film.

Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat,

¹⁸ Lissa Harrison, *Metode Penelitian Politik*, terj. Tri Wibowo, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 89

mendengar dan bertanya.¹⁹ Berdasarkan teori yang ada peneliti menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dalam Peran TNI dalam Pembinaan Teritorial (Studi Kasus Desa Sungai Ceper Kabupaten OKI).

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Berdasarkan teori yang ada peneliti menggunakan teknik pengumpuln data sebagai berikut:

- a. Observasi, menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.²⁰ Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai Peran TNI Dalam Pembinaan Teritorial (Studi Kasus Desa Sungai Ceper Kabupaten OKI).
- b. Wawancara, menurut Sugiyono²¹ wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mengumpulkan data mengenai Peran TNI

¹⁹ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*. (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 69

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 145

²¹ *Ibid.*, hlm. 231

Dalam Pembinaan Teritorial (Studi Kasus Desa Sungai Ceper Kabupaten OKI).

- c. Dokumentasi, menurut Arikunto dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Jika terdapat kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Maka metode ini yang di amati bukan hanya benda hidup saja namun benda mati juga.²² Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai Peran TNI Dalam Pembinaan Teritorial (Studi Kasus Desa Sungai Ceper Kabupaten Ogan Komering Ilir).

3. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisa yang penulis gunakan yaitu analisa kualitatif, seperti yang di kemukakan oleh Milles dan Huberman ada tiga, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Langkah-langkahnya sebagai berikut:²³

- a. Reduksi data merupakan bentuk analisa untuk mempermudah menarik kesimpulan akhir dengan cara menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu.
- b. Penyajian data merupakan teknik analisa data kualitatif, penyajiannya berupa teks naratif.

²² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 274

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 245-247

- c. Penarik kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam analisa data di mana hasil yang di dapat digunakan untuk mengambil tindakan serta tetap mengacu pada rumusan masalah dan tujuan yang hendak di capai.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengetahui dan mengikuti pembahasan serta format penulisan penelitian, maka penulis membagi tahapan atau sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman dalam melakukan penulisan dan tahap-tahap kegiatan sesuai dengan ruang lingkup yang dijelaskan sebelumnya secara garis besar, yang dibagi menjadi lima bab. Bab I memuat latar belakang pemikiran tulisan ini yakni mengenai konteks dan urgensinya. Selain itu juga diuraikan pula beberapa pertanyaan dalam bentuk rumusan masalah, serta dijelaskan tujuan dan manfaat tulisan ini. Kemudian dalam bab ini terdapat tinjauan pustaka serta teori yang digunakan dalam tulisan ini dan metodologi yang digunakan.

Pada bab II dipaparkan mengenai perdebatan diskursus hubungan antara sipil dan militer. Pada bab ini menjelaskan juga bagaimana awal mula keterlibatan militer ke ranah sipil. Kemudian mengurai mengenai TMMD. Sementara itu, Bab III menjelaskan gambaran umum objek penelitian dan menjelaskan proses kebijakan TNI dalam kegiatan TMMD.

Bab IV menampilkan hasil dari tulisan ini yang menjelaskan bagaimana hubungan militer-sipil dalam kebijakan TMMD di Desa Sungai Ceper, serta implementasi dari pembinaan territorial di lihat dari pendekatan *human security*. Kemudian, Bab V merupakan kesimpulan akhir dari tulisan ini.